



## Rampung, Berkas Kasus Dugaan Korupsi Perdin Mantan Sekwan

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar segera memasuki babak baru. Pascavonis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Patra dengan pidana penjara selama setahun, penyidik Kejari Denpasar sudah merampungkan berkas untuk tersangka mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta.

Dikonfirmasi Senin (17/4) kemarin, Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri membenarkan bahwa berkas untuk tersangka Rai Suta sudah rampung. Dengan begitu, pekan ini akan dilakukan tahap II, yakni pelimpahan barang bukti, berkas dan tersangka ke jaksa penuntut umum. "Jika tidak

ada halangan, Kamis tanggal 20 April lusa sudah kami lakukan pelimpahan," katanya.

Saat disinggung kemungkinan adanya tersangka lain, sebagaimana disebutkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar bahwa sesuai perwali mereka yang bertanggung jawab adalah pihak yang melaksana-

kan perdin, Kajari Denpasar ini menegaskan bahwa yang paling bertanggung jawab adalah Sekwan DPRD Denpasar.

Seperti diberitakan sebelumnya, berembus kabar bahwa ada dua pihak lain yang terseret dan namanya selalu muncul dalam kasus perdin ini, yakni *travel* yang mendapat tugas mengatur perdin dewan tanpa tender dan dewan sendiri selaku pelaksana perdin. Ada dua *travel* yang mengerjakan proyek perdin tersebut.

Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri dalam menyikapi perkara ini berpendapat lugas bahwa dalam kasus ini sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara yang nilainya Rp 2,2 miliar lebih. "Menurut

kami, yang terpenting dalam kasus ini adalah adanya pengembalian Rp 2,2 miliar lebih. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Sebelumnya, PPTK I Gusti Made Patra dalam kasus perdin DPRD Kota Denpasar divonis bersalah oleh majelis hakim tipikor pimpinan Sutrisno. Dalam sidang yang berlangsung Kamis (30/3) lalu, terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai PPTK DPRD Kota Denpasar divonis atau dihukum selama setahun penjara.

Hakim dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebankan mengganti kerugian keuangan negara Rp 2,2 miliar lebih, sebagai akibat perbu-

tan terdakwa. Alasannya, pihak DPRD Kota Denpasar sudah menitipkan kerugian itu sebelum masa tuntutan yang dititipkan lewat kejaksaan. Hakim juga menyatakan uang yang dititip itu dirampas oleh negara untuk selanjutnya dihitung sebagai pengembalian uang sebagai akibat kerugian negara. Dalam amar putusannya, hakim juga menyinggung bahwa yang mempunyai inisiatif perdin ini adalah Dewan Denpasar. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari  
pada acara Citra Bali  
Radio Global FM  
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Selasa, 18 April 2017

Hal : 2



## Transparansi Penggunaan Anggaran Realisasi APBDes Dipampang

Mangupura (Bali Post) -

Tidak hanya pemerintah daerah yang menerapkan transparansi penggunaan anggaran. Sejumlah desa di Kabupaten Badung juga menerapkan hal serupa dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bahkan, sebagai bukti transparansi, pihak desa memampang penggunaan anggaran dalam baliho berukuran besar di setiap sudut desa.

Seperti halnya yang dilakukan perangkat desa di Desa Petang. Pemerintahan desa setempat memasang baliho tersebut awal April lalu. Perbekel Petang Wayan Suryantara mengatakan, pemasangan baliho APBDes ini sesuai amanat Permendagri tentang Desa. "Pemasangan baliho ini adalah salah satu wujud dari transparansi penggunaan data yang didapat oleh pemerintah

desa," ujar Wayan Suryantara, belum lama ini.

Menurut Suryantara, dalam APBDes tertera pendapatan yang diterima desa serta penggunaan anggaran tersebut. Untuk pendapatan, pemerintah desa mendapatkannya dari dana desa, ADD, PHR dan pendapatan asli desa. Dana inilah yang diinformasikan kepada masyarakat. "Dalam APBDes tahun 2017, kami

mendapat anggaran Rp 11 miliar lebih. Dalam baliho ini, kami informasikan pendapatan yang diperoleh oleh desa dan pembiayaan. Untuk pembiayaan ini biasanya untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan ke masyarakat, pemberdayaan ke masyarakat dan belanja tak terduga," tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung Putu Gede Sridana membenarkan jika pemasangan baliho informasi APBDes di setiap desa memang sesuai instruksi pemerintah pusat dan daerah. "Pemasangan baliho ini sekaligus bentuk kontrol

terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kami sarankan pemasangannya di sejumlah banjar dan pasar, sehingga masyarakat memahami dananya dibawa ke mana saja oleh perbekelnya," ujar Gede Sridana, Senin (17/4) kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) meminta APBDes harus dipublikasikan kepada masyarakat yang tertera semacam baliho yang dipampang di depan kantor desa. Upaya ini dilakukan agar masyarakat juga bisa melihat serta melakukan fungsi pengawasan. (kmb27)

Edisi : Selasa, 18 April 2017

Hal : 3



## Wali Kota Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 Rekomendasi Dewan Sebut Pembangunan Berjalan Baik Sesuai Target

WALI Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota I GN Jaya Negara menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Sidang Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (17/4) kemarin. Agenda sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini diawali dengan pidato pengantar Wali Kota dibacakan Wakil Wali Kota I GN Jaya Negara dan dilanjutkan dengan pembacaan rekomendasi DPRD Kota Denpasar yang disampaikan I.B. Kompyang Wiranata. Sidang juga dihadiri Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Denpasar.

Pidato pengantar Wali Kota yang disampaikan Wakil Wali Kota I GN Jaya Negara bahwa strategi pokok pembangunan Kota Denpasar yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah



**REKOMENDASI - Wakil Wali Kota I GN Jaya Negara menerima rekomendasi dari DPRD Kota Denpasar yang diserahkan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede pada penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Sidang Paripurna ke-2 Masa Persidangan I di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (17/4) kemarin.**

Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2016-2021 telah menunjukkan hasil yang baik. Ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dari tahun ke tahun dalam arah yang positif. Tingkat pengangguran

mengalami penurunan dengan kondisi di tahun 2010 mencapai 6,57 persen dan tahun 2015 mencapai 3,54 persen dengan angka ini masih di atas rata-rata capaian Provinsi Bali tahun 2015 yakni 1,99 persen. Sek-

tor pendidikan dengan angka rata-rata lama sekolah di tahun 2016 mencapai 11,03 tahun, yang menunjukkan program Wajib Belajar Sembilan Tahun telah dilampaui, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2016 mencapai 82,44 yang merupakan angka tertinggi di Bali.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Denpasar Tahun 2016 dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal berdasarkan pada efisiensi, efektivitas, tepat waktu dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial serta fasilitas umum yang layak berdasarkan analisis standar biaya, standar harga dan tolok ukur kinerja. "Rekomendasi yang telah disampaikan Dewan yang konstruktif akan kami kaji dan tindak lanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan

dijadikan bahan acuan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan maupun penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada masa berikutnya," ujar Jaya Negara.

Sementara itu, rekomendasi dewan yang disampaikan I.B. Kompyang Wiranata menyatakan bahwa kegiatan pembangunan tahun anggaran 2016 sudah berjalan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rekomendasi Dewan menyatakan Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali agar melakukan koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemprov Bali yang berlokasi di Kota Denpasar. Seperti kondisi trotoar yang sudah rusak, saluran drainase tersumbat yang mana Pemkot Denpasar tidak berdaya akibat kewenangan perbaikan dan pemeliharaan yang berada pada kewenangan Pemprov Bali. Dalam hal ini, masyarakat umum hanya mengetahui bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemkot Denpasar. (ad1013)

Edisi : Selasa, 18 April 2017

Hal : 2